



SESAMA IKHWAN

Sebaiknya Saling Mendukung

Isyu Neo-Masyumi kerap dilontarkan kalangan tertentu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa politik di tanah air kita belakangan ini. Seusai Munas Golkar muncul tuduhan demikian, sepak terjang ICMI pun dicap begitu. Dan terakhir, seusai Muktamar PPP muncul pula tuduhan bangkitnya Neo-Masyumi. Apa yang melatarbelakangi dilontarkannya isu tersebut? Bagaimana pula sebaiknya ummat Islam menyikapinya? Tokoh-tokoh yang dihubungi RISALAH mengungkapkan pandangan mereka.

KHM. ILYAS RUHIYAT

Pelaksana Rois 'Am Syuriyah PB-NU (Pengurus Besar Nahdatul Ulama), Pimpinan pesantren Cipasung (Tasikmalaya) dan Rektor IAIC (Institut Agama Islam Cipasung). Anggota MPR.

Kalau selama ini Islam itu mewarnai pemerintah, itu merupakan salah satu akibat, karena umat Islam itu makin kokoh dalam melaksanakan pembangunan.

Artinya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah mendapat dukungan dari umat Islam, terutama para kyai dan ulamanya.

Jadi, saya tidak memandang sebagai suatu penumpangan pemerintah atau apalah namanya. Misalnya karena ada ICMI, dan ICMI itu merupakan organisasinya pejabat-pejabat senior, rektor-rektor perguruan tinggi, dsb.

Saya kurang tahu kalau itu dikatakan sebagai Neo-Masyumi. Saya memandangnya sebagai dinamika umat Islam. Dan sekarang, umat Islam itu tidak terbatas pada satu kekuatan tertentu.

Kalau dulu golongan Islam itu kan partai-partai Islam. Sekarang umat Islam itu ada di segala golongan, ada yang di ABRI, di Golkar, PPP, organisasi massa, yayasan, dsb. Semua mereka itu memperlihatkan syi'ar-syi'ar Islam.

Jika ditinjau secara politis, partai Islam itu tidak ada karena semuanya berdasarkan Pancasila. Tetapi kalau kita memandang dari segi bahwa umat Islam itu banyak berperan dalam bidang-bidang sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi seperti terbentuknya BMI (Bank Muamalat Indonesia), BPR-BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang berdasarkan syariah dan sebagainya, itu suatu kelebihan.

Mengenai pihak-pihak tertentu yang sering melontarkan isu negatif terhadap umat Islam, saya harapkan agar mereka diberi hidayah oleh Allah, sehingga menjadi orang-orang yang shaleh. Dan akhirnya mereka mengerti bahwa kita ini warga negara Indonesia, yang meskipun berbeda agama, suku dan sebagainya tetapi dituntut untuk melaksanakan kewajiban terhadap bangsa.

Artinya, kita punya peran untuk menyelamatkan dan menyuburkan makmurkan negara serta melaksanakan pembangunan.

■MT

KHA. LATIEF MUCHTAR, MA

Ketua Umum PP Persis (Pusat Pimpinan Persatuan Islam), Direktur STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Persatuan Islam, dan mantan Wakil Rektor IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Saya kira aspirasi politik itu sudah ada dalam ajaran Islam. Jadi, ada Masyumi atau tidak, aspirasi itu terus berjalan. Yang baik jika aspirasi ini mendapat saluran. Sekarang ini, tampaknya pemerintah berusaha ke arah itu. Bukan seperti kasus Tanjung Priok yang menjadi ajang penjeratan. Saat ini penanganan kasus Pandeglang, misalnya, dilakukan secara persuasif dan edukatif.

Aspirasi Masyumi memang bersumber dari ajaran Islam, sehingga kalau ada yang menyuarakan Islam dianggap sama dengan Masyumi. Sebenarnya itu kebetulan saja. Seperti saya kemukakan tadi, ada Masyumi atau tidak, aspirasi Islam akan terus berjalan. Beri saluran terhadap aspirasi Islam, agar tidak teredam dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

Perlu dicatat, sekarang ini Masyumi sendiri secara formal sudah tidak ada. Jadi tidak benar kalau ada yang ingin menghidupkan Masyumi. Sedangkan aspirasi Islam akan selalu hidup. Juga jangan ada yang menganggap aspirasi ini berbahaya, sebab walaupun Masyumi dibubarkan pemerintah Orde Lama, sebenarnya dalam perjuangan kemerdekaan menjadi Masyumi itu partner pemerintah.

Lain sekali dengan PKI, misalnya, karena mereka pernah mengadakan pemberontakan pada pemerintah secara lembaga. Jadi PKI perlu dilarang secara lembaga maupun secara ideologi. Adapun aspirasi Islam harus terus dihidupkan, baik ada atau tidak lembaga khusus yang mewakili aspirasi tersebut.

Bagi saya rehabilitasi Masyumi bukan masalah prinsip, karena itu sekedar alat juang. Yang penting aspirasi Islam dapat disalurkan. ■PO

H. GEYS M AMAR, SH

Ketua Umum Pengurus Besar Al Irsyad

Orang-orang Masyumi dulu itu adalah orang-orang yang mempunyai integritas tinggi, dan orang-orangnya adalah orang penting. Peranan mereka dalam perjuangan kemerdekaan sampai Masyumi bubar itu besar. Jadi saya tidak mengerti apa yang mereka maksud dengan Neo-Masyumi. Apa partai yang memperjuangkan kepentingan umat Islam?

Sebenarnya pernyataan neo-masyumi itu hanyalah jargon politik saja. Tujuannya pertama, barangkali semata-mata untuk membelokkan umat Islam. Kedua, mungkin tokoh-tokoh golongan tertentu kurang berhasil meraih capaian tertentu dalam bidang politik, lalu dia marah-marah, dan mengatakan neo-masyumi muncul.

**Masyumi
itumempunyai
konsep dan
integritas,
sedangkan
yang
mengatakan
neo-masyumi
itu mungkin
tidak punya,
dan hanya
sekedar
berteriak
saja. Masyumi
itu bukan
suatu yang
jelek.
Masyumi itu
bukan
dibubarkan,
tapi
membebaskan
diri.**



Yang ketiga, orang-orang Masyumi itu mempunyai konsepsi dan integritas, sedangkan yang mengatakan neo-masyumi itu mungkin tidak punya, dan hanya sekedar berteriak saja. Masyumi itu bukan suatu yang jelek. Masyumi itu bukan dibubarkan, tapi membubarkan diri.

Saya mengetahui Masyumi itu dari bacaan dan buku-buku yang juga ditulis oleh orang Barat, karena pada waktu jaya-jayanya Masyumi saya masih duduk di bangku sekolah.

Sehubungan dengan isu yang dilontarkan sementara pihak itu, yang penting kita bekerja sesuai dengan aspirasi ummat Islam. Ada orang yang senang koar-koar saja tapi tidak bekerja, tapi ada orang kerja tapi diam saja.

Karena bebas berpendapat, silakan saja. Biarkan saja mereka berkata "Masyumi baru" atau apa. Kita tidak perlu takut terhadap hal-hal semacam itu. Pola Orde Lama harus kita tinggalkan dan kita bekerja dengan cara-cara yang Islami.

Beratnya, kalau yang menyatakan neo-masyumi itu dari kalangan Islam sendiri. Orang dari luar Islam tidak ada yang mengatakan neo-masyumi. Oleh pemerintah, dulu Masyumi dikatakan ekstrim. Sekarang tidak ada hal seperti itu.

Jadi apapun yang dikatakan, kita tidak boleh terlalu serius menanggapi. Itu kan hanya permainan politik, omongan politik, lempar sana lempar sini. ■JR

DR. DIN SYAMSUDDIN

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Kini dosen Fakultas Pasca Sarjana IAIN Sjarif Hidayatullah Jakarta, dan salah seorang fungsionaris DPP Golkar.

Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan sementara kalangan tentang bangkitnya Neo-Masyumi itu tidak beralasan dan lebih mengandung sinisme dan sentimen, karena saya tidak melihat orang-orang yang terdapat di ICMI dan di Golkar yang dituduhkan sebagai Neo-Masyumi itu adalah pewaris cita-cita Masyumi.

Mungkin dari satu sisi benar bahwa mereka banyak datang dari kalangan ummat Islam tertentu umpamanya Muhammadiyah, HMI, dsb. Saya kira tidak semua mereka seperti itu. Kemudian, alam pikiran yang dikembangkan juga tidak mungkin sama. Tuduhan itu sebetulnya terlalu dini, belum ada pembuktian dulu.

Kalau sudah setahun atau dua tahun, ada ide-ide yang mirip Masyumi, maka penisbatan itu baru beralasan. Tetapi belum apa-apa kemudian dituduhkan demikian. Bahwa sebagian kelompok dari ummat Islam, sebuah generasi dari ummat Islam membawa atau menampilkan ciri-ciri yang hampir sama dengan kelompok ummat Islam yang lain pada masa lampau itu selalu mungkin, sebab tidak ada yang baru di kolong langit ini.

Kalau ada kecenderungan yang hampir sama. Umpamanya Masyumi itu salah satu cirinya rasional. Lalu ICMI dan Golkar itu rasional, maka itu hanya kesamaan saja. Tapi kan tidak membuat dan melakukan partai Islam seperti dilakukan Masyumi. Itu bedanya. Tugas kita sebagai aktivis muslim adalah bagaimana agar kecenderungan eksploitasi itu berkecenderungan

ke arah substansi atau Islamisasi politik. Saya melihat dari jarak yang agak dekat bahwa proses substansiasi Islam pada politik itu terjadi kendati perlahan-lahan tetapi cukup meyakinkan.

Nah inilah yang menyebabkan kelompok lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri pernah menanggapi secara sinis, bahwa telah terjadi ijo royo-royo, Islamisasi, dsb.

Ummat Islam sudan berjuang sekian lama. Kalau kemudian merubah strateginya dari *struggle from withrawl* (berjuang dari luar) menjadi *struggle from within* (berjuang dari dalam) itu adalah hak ummat Islam sebagai sebuah kekuatan politik.

Sangat sayang sekali proses menuju keseimbangan nasional yang ideal dan baik ini, selalu ada pihak yang sinisme dari kelompok-kelompok lain terutama dari kelompok *walan tardha*. Saya kuatir justru aksi-reaksi, tesa-anti tesa akan menyebabkan kerugian bagi semua.

Saya kira, Indonesia yang majemuk memerlukan stabilitas.

Oleh karena itu kita menolak

tirani

mayoritas

dan diktator

mayoritas.

Diktator

mayoritas yang

menumbuhkan

politisasi agama.

Dan saya mengritik

kecenderungan

politisasi agama yang

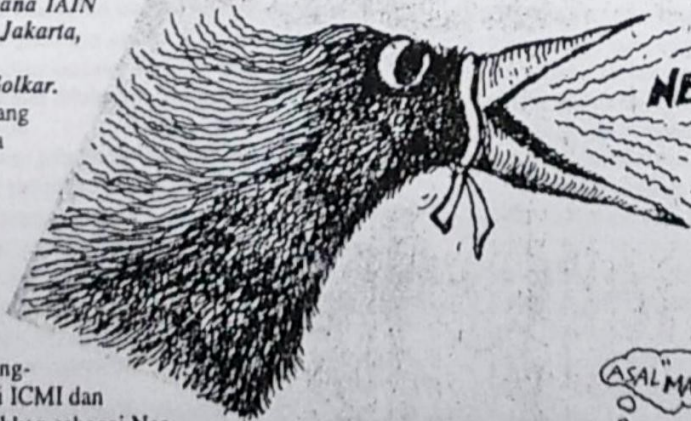
dilakukan orang

muslim, karena tidak

sesuai dengan Islam itu

sendiri. Saya lebih memilih

substansiasi Islam.



■BMT

PROF. DR. NAZARUDDIN SYAMSUDIN

Guru besar pada FISIP-UI (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia), Ketua AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia).

Saya bilang tidak usah diro-royokan juga, Islam kan tetap mayoritas. Yang namanya mayoritas diapa-apakan juga tidak akan pernah kecil, tetap besar. Masalahnya sekarang, yang minoritas juga harus tahu diri. Jangan mentang-mentang sedang

Satu hal yang mereka lupa, yaitu politik Islam itu tidak pernah memecilkan dan melecehkan yang lain. Itulah perbedaannya Islam dengan yang lain.

Kita lihat di Filipina, ketika mereka berkuasa, umat Islam ditekan. Di sini kan tidak. Maka dari itu jangan khawatir dengan ijo royo-royo ini. Mereka itu kan orang Indonesia juga. Orang Indonesia yang jumlahnya besar masa mau diabaikan.

Kita menyadari bahwa umat Islam itu jumlahnya besar, tetapi waktu itu belum punya kemampuan teknologi dan ekonomi yang kuat. Sekarang sudah tumbuh. Melalui PJP I (Pembangunan Jangka Panjang Pertama) orang Islam yang

jumlahnya besar menerima hasil pembangunan yang paling besar pula. Sekurang-kurangnya lebih baik daripada 25 tahun yang lalu. Ini kan asset nasional.

Pada akhirnya, dengan sendirinya itu berpengaruh. Sama saja dengan Filipina. Walaupun tidak pernah dikatakan Filipina itu negara Katolik, tetapi karena pemimpinnya Katolik, maka dengan sendirinya dalam peraturan dan Undang-undangnya, ide-ide Katolik masuk.

Nah, di sini juga. Mayoritas umat Islam, dengan sendirinya seperti itu. Bahkan pada saat umat Islam belum menguasai pemerintahan, Undang-undang Perkawinan pun tidak bisa lolos Kenapa? Karena kalau diloloskan, bertentangan dengan umat Islam yang besar itu.

Kita tidak berkuasa pun orang lain harus sadar. Tapi kan harus dicoba, dilakukan provokasi oleh mereka. Jadi jika membuat apa-apa, dilihat umat Islam bagaimana reaksinya. Jika ribut, maka dicabut. Jadi itu satu potensi yang tidak bisa dihilangkan.

Ini menyangkut stabilitas nasional. Sebab, kestabilan itu tidak bisa digantungkan nasibnya kepada minoritas. Lihatlah tragedi Afrika Selatan. Jadi, dimanapun kestabilan itu harus digantungkan kepada mayoritas. ■MT

DRS. H. SLAMET EFFENDY JUSUF

Ketua Umum PP (Pucuk Pimpinan) Gerakan Pemuda Anshar, mantan Ketua Umum PB PMII (Pengurus Besar Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia), dan anggota Fraksi Karya DPR.

Isyu yang dilontarkan itu hendaknya diterima saja dengan dingin. Itu kan sebenarnya sebagai suatu reaksi yang berlebihan atas dominasi kelompok tertentu di lingkungan umat

Islam oleh kelompok lainnya.

Memang, istilah itu menimbulkan rasa tidak enak dalam kehidupan kita sesama umat Islam. Tapi kita tidak usah berpikir bahwa itu (neo-masyumi) harus diwaspadai atau ditakuti, karena lontaran itu merupakan suatu stigma (penentangan) yang mungkin tidak ada.

Yang penting, supaya yang begitu-begitu itu tidak tumbuh di lingkungan umat Islam harus ada sharing. Jangan sampai ada kelompok umat Islam yang ditinggalkan, sementara kelompok umat Islam lainnya mendapat kesempatan.

Sebaiknya, kita umat Islam ini saling mendorong untuk maju, dan harus ada sharing of power (berbagi kekuasaan), sehingga tidak ada kelompok yang merasa ditinggalkan.

Dalam kaitan isyu tadi, mungkin para ulama merasa ditinggalkan, walaupun sebenarnya pengertian ulama itu sendiri masih nisbi. Apakah ulama itu orang yang menguasai keilmuan tertentu, dan mempunyai amaliah Islam tertentu pula? ■BS

DRS. AHMAD MANSYUR SURYANEGARA

Dosen senior Jurusan Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. Mantan aktivis KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia).

Adanya istilah ijo royo-royo, Neo-Masyumi, dan lain-lain itu sebetulnya tidak ada faktanya. Hal itu merupakan tuduhan-tuduhan dari pihak yang tidak menyenangi Islam dan tidak menyetujui kondisi nasional sekarang, karena semakin meluasnya hubungan antara umat Islam dengan yang lain.

Seperti halnya dulu ketika suasana kacau, kegojahan pada tahun 1948, maka siapa yang mengajak kepada kebersamaan untuk kembali kepada Pancasila, tidak lain adalah M. Natsir yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Penerangan (tokoh Masyumi).

Nah, oleh karena itu, upaya-upaya untuk melakukan keseimbangan perjuangan Islam sekarang ini bukan dengan meng- ijo-royo-royokan, me-Masyumi-kan. Masyumi hanya sebuah wadah, tidak menjadi tujuan idealisme. ■MT

...kita tidak usah berpikir bahwa itu (neo-masyumi) harus diwaspadai atau ditakuti, karena lontaran itu merupakan suatu stigma (penentangan) yang mungkin tidak ada. Yang penting, supaya yang begitu-begitu itu tidak tumbuh di lingkungan umat Islam harus ada sharing. Jangan sampai ada kelompok umat Islam yang ditinggalkan, sementara kelompok umat Islam lainnya mendapat kesempatan.